

**PERKEMBANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KEWARGANEGARAAN
INDONESIA (BAPERKI) TAHUN 1954 – 1965**

Anis Nuryani

Jurusan Pendidikan Sejarah,
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya
rafa.fashion88@gmail.com

Aminuddin Kasdi

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI) adalah organisasi massa yang dibentuk tanggal 14 Maret 1954 oleh orang Cina di Indonesia. Tujuan BAPERKI adalah menjadikan setiap warga negara menjadi warga negara Indonesia yang sejati dan menentang diskriminasi rasial. BAPERKI menjadi organisasi massa orang Cina terbesar pada zaman Orde Lama. BAPERKI memiliki menggunakan integrasi yaitu menjadi WNI tanpa harus meninggalkan ganti nama, ganti agama, dan kawin campuran. BAPERKI selain aktif dalam bidang sosial dan ekonomi, juga aktif dalam politik dengan mengikuti Pemilu 1955 dan kemudian dekat dengan Presiden Sukarno. BAPERKI mendukung berbagai kebijakan Presiden Sukarno untuk mendapat perlindungan dan memudahkan dalam melakukan usaha-usahanya. BAPERKI kemudian berada dalam satu kubu dengan Presiden Sukarno dan PKI. Anggota BAPERKI sebagian masuk ke dalam PKI. BAPERKI kemudian dibubarkan karena anggotanya ada yang terlibat dalam Gerakan 30 September dan BAPERKI merupakan organisasi massa yang Pro Sukarno.

Kata Kunci : Cina, kewarganegaraan, integrasi

ABSTRACT

Indonesian Citizenship Consultative Agency (BAPERKI) is a mass organization which was formed on March 14, 1954 by the Chinese in Indonesia. BAPERKI purpose is to make every citizen to become Indonesian citizens genuine and oppose racial discrimination. BAPERKI become China's largest mass organization in the days of the Old Order. BAPERKI have using integration is becoming citizens without having to leave the name change, change of religion, and mating mixture .BAPERKI besides active in social and economic fields, are also active in politics following the 1955 election and then close with President Sukarno. BAPERKI support policies of President Sukarno for protection and ease in performing his efforts. BAPERKI then be in a camp with President Sukarno and the PKI. Members BAPERKI partially into the PKI. BAPERKI then disbanded because its members have been involved in the September 30 Movement and BAPERKI a mass organization Pro Sukarno.

Keywords: China, citizenship, integration

. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan keanekaragaman etnis dan budaya baik yang berasal dalam maupun luar negeri seperti Cina, Arab, dan India yang kemudian dinamakan non pribumi. Sekarang ini masyarakat non pribumi yang paling banyak ditemui di Indonesia adalah orang Cina.

Mereka telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Pada masa Hindia Belanda terjadi pembagian golongan masyarakat. Pertama golongan Belanda atau Eropa, kedua golongan Timur Asing,

termasuk Cina, Arab, India, dan golongan ketiga adalah pribumi.¹

Setelah Indonesia merdeka, pribumi yang menjadi penguasa. Orang Cina menjadi sasaran kebencian pribumi karena dianggap bekerja sama dengan Belanda. Masalah yang juga dihadapi oleh orang Cina adalah masalah kewarganegaraan. Suatu negara yang menganut asas kelahiran dan negara lain menganut asas keturunan dapat menimbulkan

¹ Onghokham. *Anti Cina, Kapitalisme Cina dan Gerakan Cina*, Jakarta; Komunitas Bambu, 2008. halaman 3.

dwikewarganegaraan.² Orang Cina mengalami masalah dwikewarganegaraan karena hukum yang berlaku di Republik Rakyat Cina (RRC) dan Republik Indonesia (RI) berbeda. Menurut undang-undang kewarganegaraan Cina dari tahun 1929 maka setiap orang yang dilahirkan dari orang tua Cina, di mana pun mereka berada dan berapa lama pun mereka sudah melawat ke luar Cina, tetap tinggal warganegara sebagai Cina.³ Diskriminasi terhadap orang Cina semakin terasa dalam bidang ekonomi. Pada tahun 1950an politik Banteng berusaha memajukan kelas bisnis Indonesia dengan melarang perdagangan dan pemukiman orang Cina di pedalaman⁴. Akibat dari politik itu banyak orang Cina yang tinggal di pedesaan pindah ke perkotaan dan bergabung dengan golongan Cina lainnya.

Orang Cina sendiri merasa dirinya berbeda dengan orang pribumi dalam segala hal, sehingga perasaan sebagai golongan minoritas semakin menguat. Orang Cina semakin menunjukkan identitas kebudayaannya setelah dibangunnya berbagai sarana seperti sekolah khusus orang Cina, kelompok kebudayaan Cina, dan surat kabar berbahasa Cina. Guna menampung kepentingan-kepentingan tersebut dan dikarenakan tekanan dan suasana saat itu, maka pada tahun 1954 dibentuklah Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI). Penulis meneliti perkembangan BAPERKI karena merupakan organisasi yang mempunyai pengaruh paling besar untuk orang Cina pada waktu itu, namun sekarang jarang ditulis dalam buku-buku sejarah Indonesia. Perkembangannya menarik untuk diteliti karena BAPERKI berdiri sebagai organisasi massa namun ikut aktif dalam bidang politik dan dekat dengan Presiden Sukarno. Keterlibatan anggotanya dalam Gerakan 30 September merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode sejarah.⁵ Langkah-langkah dari metode sejarah yaitu : heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. interpretasi, dan historiografi. Berikut adalah tahapan-tahapan teknik pelaksanaan penelitian.

1. Heuristik

Pada tahap ini peneliti menelusuri dan mengumpulkan sumber-sumber yang diperlukan. Sumber-sumber yang diperlukan, dapat dibedakan menjadi sumber primer dan

² Sudargo Gautama. 1987. *Warga Negara dan Orang Asing*;berikut peraturan dan contoh-contoh. Bandung: Alumni

³ Ibid., halaman 204

⁴ Onghokham. *op.cit.*, halaman 10

⁵ Aminudin Kasdi, *Memahami Sejarah*, Surabaya: UNESA University Press, 2005. halaman 10.

sumber skunder. Sumber primer merupakan sumber yang paling aktual sehingga dapat langsung diuji. Sumber sekunder, adalah informasi yang diberikan orang yang tidak langsung mengamati atau orang yang tidak terlibat langsung dalam suatu kejadian, keadaan tertentu atau tidak langsung mengamati objek tertentu.⁶

Berdasarkan bentuk dan wujudnya sumber sejarah dapat dibedakan menjadi 3 macam : 1. Sumber berupa benda visual, 2. Sumber warisan atau berita lisan, dan 3. Sumber berupa tulisan atau grafis.⁷ Dalam penelitian ini hanya digunakan sumber lisan dan tulisan, sumber benda visual tidak digunakan karena sulitnya mencari bangunan yang berkaitan dengan BAPERKI dan terbatasnya kemampuan.

Penelitian ini juga menggunakan sumber lisan yang diperoleh dengan mewawancarai mantan anggota BAPERKI yaitu, Bapak Oei Hiem Hwie (mantan sekretaris BAPERKI cabang Malang).

Peneliti melakukan penelitian di berbagai tempat untuk mendapatkan sumber primer dan sekunder. Sumber tulisan yang diperoleh dalam penelitian ini berupa arsip dan buku-buku yang relevan. Arsip dan buku-buku tersebut penulis memperoleh dari hasil penelitian di beberapa tempat, antara lain : Badan Arsip Nasional Jakarta, Perpustakaan Nasional Jakarta, Perpustakaan Nasional RI UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno, Perpustakaan Daerah Surabaya, Perpustakaan Medayu Agung Surabaya, Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, Perpustakaan Universitas Airlangga dan beberapa toko buku.

Hasil penelusuran penulis dari berbagai tempat yang telah disebutkan di atas, didapat berbagai sumber primer:

1. Arsip Nasional, Hubungan Rakyat nomor 730, Surat Lembaga Kesatuan Bangsa Pusat tahun 1963, mengenai BAPERKI
2. Arsip Nasional, Kabinet Presiden RI 2010, surat pengantar BAPERKI
3. Arsip Nasional, Pidato Presiden 469, Amanat PJM Presiden Sukarno Pada Pembukaan Kongres Nasional Ke-VIII BAPERKI di Gedung Olahraga Gelora Bung Karno, Djakarta, 14 Maret 1963
4. Berita Baperki
5. Buku-buku terbitan BAPERKI
6. Notulen pembentukan BAPERKI
7. Koran Sin Po, Warta Bhakti, Pantjawarta, Harian Umum

2. Kritik Sumber

⁶ Alimuddin Tuwu(ed), *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993. halaman 49.

⁷ Aminudin Kasdi, *op.cit.*, halaman 14.

Kritik sumber terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern menguji otentektitas, asli, turunan, palsu, serta relevan tidaknya suatu sumber. Kritik intern menguji isi atau kandungan sumber.⁸ Kritik sumber yang pertama dilakukan pada sumber primer berupa arsip, Berita BAPERKI dan buku-buku terbitan BAPERKI.

Pada penelitian ini penulis hanya melakukan kritik intern terhadap sumber yang diperoleh. Kritik ekstern tidak dilakukan karena sumber tidak dilihat dari bentuk fisiknya, melainkan dari isi atau kandungan sumber. Sumber yang diperoleh penulis berupa arsip, koran, buku, dan hasil wawancara. Sumber arsip lebih utama dari pada sumber berupa buku-buku. Penulis membandingkan isi berbagai sumber yang diperoleh berupa buku, kemudian memilah sumber mana yang relevan. Berbagai buku yang diperoleh oleh penulis tentang BAPERKI tidak semua mempunyai kesamaan. Penulis memilih sumber buku mana yang merupakan fakta dan dapat dimasukkan dalam penelitian ini.

3. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran yaitu menghubungkan fakta-fakta dari sumber sejarah yang diperoleh, baik sumber primer dan skunder, kemudian menafsirkannya. Di dalam penelitian ini, BAPERKI antara tahun 1954 sampai 1965, memiliki keterkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia pada tahun tersebut. Tugas peneliti mencari keterkaitan tersebut, kemudian menafsirkannya. Antara tahun 1954 sampai 1965 di Indonesia terjadi berbagai peristiwa yang menarik. Pemilu tahun 1955, demokrasi terpimpin dan Gerakan 30 September merupakan peristiwa yang mempengaruhi perkembangan BAPERKI. Fakta-fakta yang diperoleh dari arsip, buku dan hasil wawancara kemudian dihubungkan dan ditafsirkan

4. Historiografi

Tahap akhir penelitian sejarah adalah penulisan. Tafsiran dari fakta-fakta yang diperoleh kemudian ditulis menjadi suatu karya ilmiah berupa skripsi. Hasil penafsiran dari fakta-fakta tentang BAPERKI, ditulis menjadi sebuah cerita. Penulisan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah.

Penulis membuat cerita dari tafsiran-tafsiran tentang BAPERKI. Tafsiran-tafsiran tersebut mempunyai hubungan dengan berbagai peristiwa di Indonesia pada saat itu, sehingga penulis lebih mudah dalam membuat cerita.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Kelahiran BAPERKI

Sebelum BAPERKI lahir sudah ada organisasi-organisasi yang memperjuangkan kepentingan minoritas orang Cina di Indonesia, salah satunya Partai Demokrat Tionghoa Indonesia (PDTI).⁹ Organisasi tersebut kurang bisa menjelaskan posisi orang Cina di dalam bangsa Indonesia. Perbedaan paham pun terjadi di dalam PDTI, paham pertama menyebutkan bahwa mendirikan partai minoritas orang Cina semakin menjauhkan diri dari bangsa Indonesia. Paham kedua, mempercayai bahwa dengan bergabungnya orang Cina ke dalam organisasi kaum mayoritas adalah sia-sia, karena dalam organisasi tersebut orang Cina tetap saja diasingkan. Perbedaan paham tersebut menimbulkan perselisihan. Anggota organisasi yang berpaham lain berangsur-angsur keluar dari PDTI.

Pada akhir tahun 1953, masa Kabinet Ali, muncul Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan baru yang diusulkan oleh Menteri Luar Negeri Sunario. RUU tersebut dimaksudkan untuk menggantikan UU Kewarganegaraan tahun 1946 dan hasil perjanjian KMB yang masih menggunakan sistem pasif, akan diubah menjadi sistem aktif. Tujuan pembuatan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru tersebut untuk membuat orang Cina yang ada di Indonesia banyak yang menjadi warga asing. Berbagai bidang usaha seperti ekspor-impor, transportasi distribusi dan penggilingan beras pada umumnya dikuasai oleh orang-orang Cina. Apabila RUU tersebut berhasil disahkan, maka pribumi bisa mengambil alih berbagai usaha yang dipegang oleh orang Cina. Menteri Luar Negeri Sunario mengusulkan RUU tersebut diberikan kepada kabinet pada Agustus 1953, yang isinya sebagai berikut :

1. Pasal 1. Hanya penduduk keturunan asing yang sudah menetap di Indonesia selama tiga generasi diizinkan mengajukan permohonan untuk menjadi warga Negara Indonesia
2. Pasal -2. Yang mendaftarkan harus dapat membuktikan bahwa orang tuanya lahir di Indonesia dan telah tinggal di Indonesia selama 10 tahun berturut-turut.¹⁰

Dua pasal RUU di atas ditentang oleh warga keturunan Cina di Indonesia karena banyak orang Cina yang akan menjadi warga asing apabila RUU tersebut berhasil disahkan. Surat-surat di catatan sipil ada kemungkinan hilang karena adanya perang kemerdekaan. Akibatnya RUU tersebut mendapat penolakan

⁹Leo Suryadinata.*op.cit.*, *Negara Dan Etnis Tionghoa; kasus Indonesia*. halaman 44

¹⁰Benny.G.Setiawan. *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. Jakarta : Transmedia Pustaka, 2008, halaman 722

⁸Aminuddin Kasdi.*op.cit.*, halaman 10

dari orang-orang Cina. Penolakan juga terjadi di DPR, khususnya oleh anggota-anggota DPR dari keturunan Cina.¹¹

Tokoh yang paling aktif menentang RUU itu adalah Siauw Giok Tjhan, ketua Fraksi Nasional Progresif, anggota parlemen dan dekat dengan perdana menteri Ali Sastroamidjojo. Ia banyak berpidato di parlemen dan menulis berbagai artikel di surat kabar yang berisi penentangannya terhadap RUU itu. Sistem pasif menurut Siauw merupakan sistem yang sesuai dengan konvensi internasional, yaitu mengutamakan kewarganegaraannya sendiri dari pada kewarganegaraan negara lain.¹²

Adanya permasalahan dari RUU itu menyadarkan masyarakat keturunan Cina di Indonesia akan perlunya suatu badan yang dapat menyalurkan dan memperjuangkan kepentingannya. Pada bulan Februari 1954, pimpinan PDTI memutuskan untuk membentuk suatu organisasi massa yang didukung oleh seluruh orang Cina di Indonesia. Mereka kemudian menghubungi organisasi Cina yang mirip PDTI, diantaranya Persatuan Warga Indonesia Turunan Tionghoa (PERWITT), Persatuan Warga Indonesia Tionghoa (PERWANIT), dan Perserikatan Tionghoa Peranakan (PERTIP).¹³ Oei Tjoe Tat ditunjuk sebagai koordinasi rapat pembentukan organisasi.

Keputusan dari rapat itu adalah membentuk suatu organisasi massa, bukan partai politik. Organisasi massa dinilai lebih dapat mendapatkan dukungan dari pada partai politik, karena dapat menampung anggota dari partai manapun. Juga diusulkan untuk menamakan organisasi tersebut dengan Badan Permusyawaratan Warga Negara Turunan Tionghoa atau BAPERWAT, dan Oei Tjoe Tat ditugaskan untuk menyusun rancangan Anggaran Dasar organisasi tersebut. Untuk calon ketua mereka berpendapat bahwa diperlukan seseorang yang sudah berada di kancah nasional dan dekat dengan DPR agar dapat melindungi mereka sebagai orang Cina. Calon yang tepat untuk menjadi ketua BAPERWATT adalah Siauw Giok Tjhan, selain dekat dengan DPR ia juga diterima di berbagai partai politik.

Tanggal 13 Maret 1954, di gedung Sin Ming Hui, berdasarkan risalah rapat hadir 44 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh PDTI, PERWANIP, PERWITT, PERTIP, dan orang-

orang Cina dari berbagai aliran.¹⁴ Pada awalnya Siauw Giok Tjhan menolak untuk dipilih sebagai ketua, karena mempunyai prinsip untuk tidak ikut dalam organisasi yang mementingkan golongannya, yaitu orang Cina. Siauw Giok Tjhan tidak setuju dengan nama Baperwatt karena mengandung kata Tionghoa. Kata kewarganegaraan juga diperlukan karena Siauw sendiri menganut nasion buildings yang mencakup juga kewarganegaraan.

Nama Baperwatt mendapat dukungan salah satu satunya dari Yap Thiam Hien. Ia berpendapat kata Tionghoa perlu disertakan karena meskipun sifat kecinaan dihapuskan, namun mereka tetap diperlakukan sebagai orang asing, selain menurutnya apabila organisasi tersebut nantinya bersifat kecinaan, kenapa tidak berani memakai kata Tionghoa.¹⁵ Sebelumnya Yap mengusulkan organisasi itu bernama Babperwatt, Badan Berdjoang Permusyawaratan Warga Negara Keturunan Tionghoa.

Kedua kelompok saling berdebat. Kelompok yang setuju memakai nama Tionghoa dan yang tidak setuju menggunakan nama Tionghoa mengadakan musyawarah untuk menentukan nama organisasi itu. Akhirnya kelompok yang tidak menyetujui adanya kata Tionghoa untuk nama organisasi mendapat dukungan penuh, sehingga organisasi itu resmi bernama Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, disingkat BAPERKI.¹⁶ Sejak saat itu sejarah BAPERKI dimulai.

Tujuan BAPERKI sebagaimana diterangkan dalam Anggaran Dasar BAPERKI pasal 3, ialah :

- a. Memperjuangkan pelaksanaan cita-cita nasional, yaitu untuk menjadikan tiap-tiap warganegara seorang warganegara Indonesia yang sejati
- b. Memperjuangkan pelaksanaan asas-asas demokrasi dan hak-hak asas manusia
- c. Memperjuangkan reaksiasi persamaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta kesempatan-kesempatan untuk maju bagi tiap warganegara dengan tidak memandang keturunannya, kebudayaannya, adat kebiasaannya, maupun agamanya.¹⁷

Dalam rapat pembentukan BAPERKI tanggal 13 Maret 1954 di Jakarta juga dihasilkan asas BAPERKI, yaitu :

¹⁴ Benny G. Setiawan. *op.cit.*, halaman 727

¹⁵ Leo Suryadinata. *Tokoh Tionghoa & Identitas Indonesia. op.cit.*, halaman 156

¹⁶ Siauw Giok Tjhan. *op.cit.*, halaman 235

¹⁷ Arsip Nasional Indonesia, Hubungan Rakyat no. 730 tahun 1963, lembar ke-3

¹¹ Koran Sin Po, 30 Januari 1954, halaman 5

¹² Koran Sin Po, 20 Februari 1954, halaman 4

¹³ Siauw Tiong Djin. *Siauw Giok Tjhan Perjuangan Seorang Patriot Membangun Nasion Indonesia dan Masyarakat Bhineka Tunggal Ika* halaman 195

- I. Badan ini merupakan permusyawaratan dan perjuangan yang menghimpun persatuan kehendak dan usaha segenap warganegara untuk memperjuangkan dengan sesungguhnya pelaksanaan cita-cita nasional yaitu, menjadikan tiap-tiap warganegara menjadi warganegara Indonesia sejati
- II. Badan ini merupakan suatu gabungan dari warga Negara Indonesia yang walaupun masing-masing mungkin mempunyai pendirian politik berlainan namun semua keyakinan, bahwa perbedaan perlakuan terhadap berbagai golongan sesama warga Negara Indonesia semata-mata berdasarkan keturunan, merugikan kepentingan Negara.
- III. Badan ini berpendirian bahwa keragaman rakyat Indonesia merupakan syarat terpenting untuk kebahagiaan Negara dan bangsa Indonesia, maka oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia dengan sungguh-sungguh harus dijauhkan dari segala sesuatu yang dapat merintangi atau membahayakan keragaman itu.
- IV. Badan ini berpendapat bahwa keadilan dan kesempurnaan warganegara Indonesia serta kesejahteraan rakyatnya hanya terjamin bila hak-hak dan kebebasan manusia seperti tercantum di dalam pernyataan umum hak-hak manusia seperti di dalam UUDS RI dalam Negara Indonesia benar-benar dilaksanakan.
- V. Badan ini berpendirian bahwa dengan adanya berbagai jenis kebudayaan di kepulauan Indonesia ini yang saling mempengaruhinya, berjalanlah proses akulturasi yang sangat bermanfaat untuk perkembangan dan penambahan kekayaan kebudayaan Indonesia dalam arti seluas-luasnya, maka badan ini berpendapat bahwa harus diberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masing-masing golongan untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaannya.¹⁸

2. Usaha BAPERKI Di Bidang Politik

Pada kongres Baperki yang kedua yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 7, 8, dan 9 Agustus 1954, diputuskan bahwa BAPERKI ikut

¹⁸ Arsip Nasional Indonesia, Hubungan Rakyat no.730 tahun 1963, Surat Lembaga Kesatuan Bangsa Pusat, lembar ke-5

serta dalam Pemilihan Umum tahun 1955.¹⁹ Maklumat Bung Hatta yang menerangkan bahwa siapa saja baik partai, organisasi massa, ataupun perorangan dapat mengikuti pemilu, juga menjadi alasan BAPERKI ikut dalam Pemilu.²⁰ Keputusan BAPERKI ikut serta dalam Pemilu mengandung kontroversi bagi para anggotanya, namun dalam pemungutan suara disepakati BAPERKI ikut dalam pemilu.

Berdasarkan suara yang diperoleh dalam Pemilu tahun 1955, BAPERKI berhasil menempatkan satu wakilnya dalam DPR, yaitu Siauw Giok Tjhan. Melalui DPR, Siauw memperjuangkan kewarganegaraan dengan menentang peraturan-peraturan pemerintah yang dipandang mengandung unsur diskriminasi sosial.

BAPERKI juga berusaha ikut dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam hal keutuhan bangsa. Masalah Irian Barat yang belum terselesaikan dalam Konferensi Meja Bundar, menimbulkan berbagai dukungan dari rakyat Indonesia kepada pemerintah untuk membebaskan Irian Barat dari Belanda. Pernyataan-pernyataan bersama berbagai partai dan organisasi bahwa mereka siap membantu aksi pembebasan Irian Barat. Pada rapat Panitia Aksi Pembebasan Irian Barat Kabupaten Lahat yang dilaksanakan 31 Oktober 1957, menghasilkan keputusan bahwa anggota rapat merupakan perwakilan dari 42 partai dan organisasi akan aktif dalam aksi pembebasan Irian Barat berdasarkan Revolusi Tahun 1945.²¹ BAPERKI menjadi anggota panitia tersebut, diwakili oleh Sow Tin Lian.

Dalam mewujudkan jiwa Bhinneka Tunggal Ika, Siauw Giok Tjhan menyatakan bahwa BAPERKI menganut konsep integrasi.²² Konsep integrasi yaitu ikut serta dalam pembangunan bangsa tanpa harus menghilangkan jati dirinya. Konsep integrasi merupakan lawan dari paham asimilasi yang menghendaki peleburan secara total. BAPERKI menentang adanya asimilasi secara paksa karena merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia.²³ Menurut paham integrasi, orang Cina tidak perlu mengganti namanya menjadi nama Indonesia asli. Selain nama, orang Cina juga tidak perlu berganti agama dan meninggalkan

¹⁹ Koran Sin Po, 10 Agustus 1954, halaman 3

²⁰ Wawancara dengan Oe Hiem Hwie, sekretaris BAPERKI cabang Malang tahun 1960

²¹ Arsip Nasional, Kabinet Presiden no 1427 Panitia Peringatan Hari Pahlawan 10 November 1957 Kotapraja Salatiga.

²² Leo Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa, *op.cit.*, halaman 65

²³ Wawancara dengan Oe Hiem Hwie, sekretaris BAPERKI cabang Malang tahun 1960

adat orang Cina seperti barongsai ataupun hari besar Imlek. Indonesia terdiri dari masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai ras dan etnis. BAPERKI menghendaki orang Cina sebagai etnis tersendiri di Indonesia, namun juga bagian dari warga Negara Indonesia yang ikut serta dalam pembangunan bangsa.

3. Usaha BAPERKI Di Bidang Ekonomi

Konsep ekonomi yang dianut oleh BAPERKI adalah ekonomi nasional. Konsep ini merupakan ide dari Siauw Giok Tjhan yang kemudian digunakan sebagai konsep ekonomi BAPERKI. Pembentukan ekonomi nasional menurut Siauw adalah suatu upaya menjamin penggunaan kekayaan alam dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Usaha-usaha BAPERKI dalam memperjuangkan kewarganegaraan mempunyai dampak positif bagi orang-orang Cina di Indonesia. BAPERKI yang mengusahakan sebanyak mungkin orang Cina menjadi warga negara Indonesia yang sah, menjadikan semakin sedikit orang asing di Indonesia. Orang-orang Cina yang telah menjadi warga Negara Indonesia dapat melakukan perdagangan. Berbagai pemikiran dari orang Indonesia asli tentang pengambil alihan perdagangan yang dikuasai orang asing dapat diatasi dengan menjadikan orang-orang Cina menjadi warga Negara Indonesia.

4. Usaha BAPERKI Di Bidang Sosial

Pada tanggal 5 Desember 1957, Siauw Giok Tjhan dan 13 anggota parlemen yang mewakili PNI, PKI, BAPERKI, NU, Masjumi dan Partai Katolik, mengajukan petisi kepada pemerintah bahwa semua orang yang telah ikut dalam pemilihan umum dibebaskan dari pelaksanaan perjanjian dwi kewarganegaraan. Atas desakan Siauw, pada tahun 1960 permintaan tersebut diterima oleh Perdana Menteri Djuanda.

BAPERKI melalui Siauw Giok Tjhan berhasil menjadikan banyak orang Cina menjadi WNI. Usaha Siauw selanjutnya ialah meyakinkan kepada orang-orang Cina agar memilih menjadi WNI. Pada 1 April 1960 Siauw Giok Tjhan dalam ceramahnya yang diselenggarakan BAPERKI cabang Jakarta, menyatakan tetap memilih kewarganegaraan Indonesia dan meyakinkan orang-orang Cina bahwa dengan menjadi WNI tidak harus ganti nama.²⁴

²⁴ Koran Pantjawareta, 2 April 1960, halaman 1

Keberhasilan BAPERKI dalam menjadikan banyak orang Cina sebagai WNI, membuat anak-anak yang orang tuanya menjadi WNI, kehilangan sekolahnya. Mereka yang menempuh ilmu di sekolah khusus untuk Cina yang bukan WNI, harus pindah. Untuk menampung mereka, BAPERKI mendirikan berbagai sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga Universitas.²⁵

Dalam usaha menjadikan orang Cina di Indonesia menjadi WNI, BAPERKI ikut membantu pengerjaan pelepasan kewarganegaraan RRT. Seperti di Semarang, BAPERKI Cabang kota itu ikut membantu pengadilan setempat dalam kepengurusan penanggalan kewarganegaraan RRT sehingga dapat berjalan dengan lancar.²⁶

5. BAPERKI dan Sukarno

Tahun 1956 muncul tiga kekuatan yang menguasai politik Indonesia. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang diwakili oleh Masyumi dan PSI yang menuntut pemberian kekuasaan yang lebih besar untuk pemerintahan-pemerintahan daerah.

Kelompok yang kedua dipimpin oleh Presiden Soekarno. Dibentuknya kabinet parlementer dari tahun 1945 membuat Presiden Soekarno tidak langsung memegang peranan eksekutif dalam pemerintahan. Presiden Soekarno menginginkan terlibat langsung dalam pemerintahan karena kabinet parlementer yang tidak stabil. Kegagalan kabinet parlementer membuat Presiden Soekarno menggagaskan sistem pemerintahan yang baru yaitu, Demokrasi Terpimpin. Ide Demokrasi Terpimpin diperoleh dari perjalanan Presiden Soekarno ke RRT dan Uni Soviet.²⁷ Partai yang menyetujui gagasan itu adalah PNI, PKI, dan partai-partai nasionalis kecil lainnya. BAPERKI di bawah Siauw Giok Tjhan mendukung gagasan tersebut dengan harapan sistem pemerintahan yang baru dapat menyelesaikan masalah kewarganegaraan. Anggota Fraksi Nasional Progresif juga mendukung. Kelompok ketiga adalah Angkatan Darat yang dipimpin oleh Jendral Nasution. Angkatan Darat menginginkan kekuasaan di bidang politik diperbesar.

Konferensi Nasional BAPERKI VII di Semarang dari tanggal 25 sampai 28 Desember tahun 1960 mengambil keputusan untuk

²⁵ Wawancara dengan Oei Hiem Hwie, sekretaris BAPERKI cabang Malang tahun 1960, tanggal 3 Januari 2014, jam 11.00

²⁶ Koran Sin Po, tanggal 24 Juli 1960, halaman 5

²⁷ Siauw Tjong Djinn. *op.cit.*, halaman 279

mengirim surat kepada Presiden Soekarno yang isinya menyatakan BAPERKI bertekad menerima komando Presiden Soekarno agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur.²⁸ BAPERKI yang siap menerima komando presiden dapat diartikan bahwa BAPERKI menerima Manifesto Politik yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.

Presiden Sukarno termasuk salah satu tokoh yang mendukung BAPERKI. Presiden Sukarno sering datang dalam kongres yang diadakan BAPERKI. Pidato Presiden Sukarno dalam Kongres Nasional ke-VIII BAPERKI terdapat kalimat yang menerangkan alasan untuk hadir dalam kongres, sebagai berikut :

“Saudara-saudara, BAPERKI sekarang mengadakan kongres yang ke-VIII, saya diundang datang di sini. Jauh-jauh sebelum ada kongres ini, dan pada waktu pertama kali ditanya kepada saya, sudi apakah kiranya PYM Presiden datang di kongres BAPERKI ?

Saya menjawab, mau. Insya Allah, mau. Apa sebab? Sebabnya ya BAPERKI itu satu perkumpulan yang baik. BAPERKI tegas berdiri di atas Pancasila. BAPERKI tegas membantu terlaksananya Amanat Penderitaan Rakyat. BAPERKI tegas berdiri di atas Manipol-Usdek dan lain sebagainya. BAPERKI adalah salah satu pejuang dari pada Revolusi Indonesia. Oleh karena itu saya datang.”²⁹

Tahun 1963 muncul organisasi baru yang juga mengurus nasib orang Cina. Organisasi tersebut bernama Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB). Organisasi tersebut mempunyai asas yang berbeda dalam menyelesaikan masalah minoritas Cina. LPKB menggunakan asas asimilasi, sedangkan BAPERKI menggunakan integrasi. Presiden Sukarno setuju dengan pembentukan LPKB dan hadir dalam pembentukannya. Sikap Presiden Sukarno itu sempat membuat khawatir BAPERKI, namun selanjutnya Presiden Sukarno menyatakan lebih mendukung BAPERKI secara pribadi. Pidatonya dalam Kongres Nasional ke-VII BAPERKI, Presiden Sukarno mengutarakan bahwa untuk menjadi warga Indonesia tidak perlu mengganti nama dan agama karena itu merupakan urusan pribadi.³⁰

Kedekatan BAPERKI dan Presiden Sukarno merupakan pengaruh dari Siauw Giok Tjhan sebagai ketua BAPERKI. Siauw telah dekat dengan Presiden Sukarno sejak BAPERKI belum terbentuk. Pada saat Siauw menjadi

Menteri Negara dalam Kabinet Amir, Presiden Sukarno pernah memberi Siauw tiga buah baju baru karena baju yang dipakai Siauw ada sobekannya.³¹ Siauw kemudian membawa BAPERKI sebagai pendukung program-program Presiden Sukarno. Siauw mendukung Presiden Sukarno yang menentang imperialisme dan berusaha mewujudkan tujuan revolusi Indonesia, yaitu mewujudkan sosialisme ala Indonesia. Ideologi dari Siauw Giok Tjhan adalah sosialisme. Siauw merasa satu ideologi dengan Presiden Sukarno.

6. Pembubaran BAPERKI

Siauw Giok Tjhan yang berpaham sosialis merasa kagum dengan Presiden Sukarno yang ingin mewujudkan tujuan revolusi Indonesia, yaitu mewujudkan sosialisme ala Indonesia. Siauw Giok Tjhan kemudian membawa BAPERKI untuk mendukung segala kebijakan Presiden Sukarno. Siauw selain mempunyai ujuan yang hampir sama, keputusan untuk menjadi pendukung Presiden Sukarno agar BAPERKI mendapat perlindungan.

Indonesia yang telah mengalami krisis ekonomi saat itu membutuhkan bantuan dari negara lain. Kebijakan Presiden Sukarno untuk berkonfrontasi dengan Malaysia berdampak pada hubungan Indonesia dengan negara luar lainnya. Indonesia tidak mendapatkan bantuan dari IMF. Di tahun 1960an Indonesia mengalami defisit dikarenakan menteri dalam kabinet yang kurang pandai. Keadaan tersebut membuat Presiden Sukarno semakin dekat dengan negara komunis yaitu RRC dan Uni Soviet.

Kedekatan Presiden Sukarno dengan RRC sebenarnya membawa BAPERKI dalam situasi yang menguntungkan. Perjuangan BAPERKI dalam memperjuangkan kewarganegaraan khususnya orang Cina jadi lebih mudah. Peraturan-peraturan yang dapat mengaundung diskriminasi rasial dapat dihapuskan. Ketua BAPERKI Siauw Giok Tjhan bahkan sering menjadi pembicara antara Presiden Sukarno dengan Pimpinan RRC.³² Kedekatan tersebut menjadikan Presiden Sukarno dekat dengan paham komunis yang juga menguntungkan PKI. Presiden Sukarno tidak bisa melepaskan paham komunis dari Indonesia.

Paham komunis akhirnya diterapkan oleh Presiden Sukarno di berbagai bidang di Indonesia dengan konsep Nasional, Agama, Komunis (NASAKOM). Presiden Sukarno ingin menyatukan berbagai paham yang ada di

²⁸ Koran Sin Po, 28 Desember 1960, halaman 5

²⁹ Arsip Nasional Indonesia, Pidato Presiden Nomor 469. *op.cit.*, lembar ke-2

³⁰ *Ibid.*, lembar ke-14

³¹ Siauw Tjong Djin. *op.cit.*, halaman 141

³² *Ibid.*, halaman 381

Indonesia. Tujuannya ialah semua kekuatan di Indonesia baik dari golongan kiri atau kanan dapat bersatu mewujudkan revolusi Indonesia dibawah NASAKOM.

BAPERKI yang pro Presiden Sukarno dengan sendirinya juga ikut mendukung berbagai kegiatan PKI. Siauw Giok Tjhan sebagai ketua BAPERKI menegaskan bahwa BAPERKI tidak berafiliasi dengan PKI, namun para pimpinan dan anggota banyak yang menjadi anggota PKI. BAPERKI berada dalam satu kubu dengan Presiden Sukarno dan PKI. Dalam kedekatan tersebut, PKI juga mendukung BAPERKI dalam berbagai bidang. PKI juga mendukung BAPERKI dalam masalah diskriminasi rasial yang dialami orang Cina. D.N. Aidit sebagai ketua PKI pun mendukung pandangan-pandangan Siauw Giok Tjhan. Kongres BAPERKI di Malang tanggal 12 Mei 1965, D.N. Aidit menyatakan bahwa ia menganggap BAPERKI sebagai alat revolusi yang baik dan bisa selalu diandalkan, PKI akan selalu membantu BAPERKI dalam melawan rasialisme.³³

Hubungan timbal balik terjadi antara PKI dan BAPERKI. Usaha-usaha BAPERKI dalam melawan diskriminasi rasial dan malah kewarganegaraan selain mendapat dukungan dari Presiden Sukarno, juga dari PKI. Pidato-pidato Siauw dalam melawan diskriminasi rasial mendapat dukungan dari PKI. Pada tahun 1965 PKI aktif demonstrasi di jalan-jalan dengan menggerakkan massa. Demonstrasi di jalan-jalan memerlukan massa, transportasi, dan dana. PKI meminta bantuan pada BAPERKI untuk membatu kegiatan demonstrasi tersebut.³⁴ BAPERKI memiliki banyak sekolah dan pelajar. PKI mengandalkan para pelajar BAPERKI untuk turun ke jalan-jalan. Anggota dan simpatisan BAPERKI banyak yang berprofesi sebagai pedagang. PKI mendapat sumbangan dari pedagang itu. BAPERKI memiliki gedung-gedung sekolah dan tempat rapat yang dapat digunakan untuk menampung para demonstran PKI. Mahasiswa Universitas Res Publica ada yang mengikuti pelatihan militer yang diadakan oleh PKI di Lubang Buaya Jakarta, mulai tanggal 5 Juli 1965.³⁵

Tanggal 1 Oktober 1965 dini hari terjadi kudeta terhadap para Jendral yang didalangi oleh PKI. Kudeta itu bernama Gerakan 30 September. Pagi jam 07.30 RRI yang telah dikuasai PKI mengumumkan bahwa telah dibentuk Dewan Revolusi yang akan menggantikan Kabinet Dwikora. Dalam daftar nama anggota Dewan Revolusi, Siauw Giok

Tjhan terdapat di dalamnya. Siauw merasa tidak mengetahui tentang kenggotaannya dalam Dewan Revolusi Indonesia dan tidak pernah dikonsultasikan.³⁶ Mayjen Soeharto selaku Pimpinan Angkatan Sementara Angkatan Darat bertindak cepat mengatasi kekaucauan saat itu. Sore hari RRI yang sudah dapat dikuasai dengan mudah karena hanya diduduki oleh Pemuda Rakyat. Mayjend Soeharto beserta kekuatan militernya berhasil menangkap para pelaku Gerakan 30 September dan menemukan jenazah para korban di Lubang Buaya. Hancurnya Gerakan 30 September dengan cepat menunjukkan bahwa kekuatan PKI belum siap untuk melakukan kudeta.

Organisasi massa yang dianggap bernanung di bawah PKI ikut hancur, tak terkecuali BAPERKI. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Ganjang Malyasia No.85/Kogam/1966 memutuskan membubarkan organisasi yang seazas/berlindung/bernanung di bawah PKI termasuk BAPERKI yang di dalamnya termasuk Perhimpunan Mahasiswa Indonesia, Permusyawaratan Pemuda Indonesia, dan Universitas Res publica.³⁷

BAPERKI merupakan organisasi massa, sehingga anggota bebas mengikuti partai politik atau organisasi massa yang lainnya. Para pemuda BAPERKI terutama Mahasiswa Universitas Res Publica banyak yang bergabung dengan organisasi pemuda milik PKI seperti Pemuda Rakyat. Sebagian pemuda BAPERKI memilih untuk bergabung dengan Pemuda Rakyat karena dinilai lebih militan. BAPERKI secara resmi tidak menyatakan ikut membantu Gerakan 30 September, namun pada kenyataannya banyak anggota BAPERKI yang terlibat. Pelajar dan mahasiswa BAPERKI terbukti telah mengikuti pelatihan militer PKI di Lubang Buaya.

Anggota BAPERKI ada terlibat langsung berusaha melindungi D.N. Aidit setelah peristiwa Gerakan 30 September. Siswandi anggota biro khusus PKI yang juga pengurus BAPERKI tertangkap sedang bersembunyi di kolong tempat tidur yang ditutup spre, ³⁸ Sriharto seorang intelejen Direktorat Khusus staf Angkatan Bersenjata menyusup ke orang-orang PKI yang akan menyelamatkan D.N. Aidit. Sriharto kemudian

³⁶ Siauw Giok Tjhan.*op.cit.*, halaman 384

³⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia.*op.cit.*, lampiran 22

³⁸ Hendro Subroto. *Dewan Revolusi PKI Menguak Kegagalannya Mengkomunikasikan Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2008. halaman 53

³³ *Ibid.*, halaman 383

³⁴ Siauw Tiong Djin. *loc.cit*

³⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia.*op.cit.*, halaman 67

menemui Siswandi. Dalam pertemuan tersebut Siswandi meminta Sriharto untuk melindungi D.N. Aidit. Siswandi tertangkap karena terbukti ingin melindungi D.N. Aidit dan merupakan anggota BAPERKI.

Di luar Jakarta anggota BAPERKI dikejar dan ditangkap. Anggota BAPERKI yang menjadi anggota PKI dan Pemuda Rakyat ditangkap terlebih dahulu. Mereka ditangkap tanpa pernah diadili. Sebagian besar para anggota BAPERKI dan simpatisannya tidak ditangkap namun dijadikan korban pemerasan oleh penguasa militer. Pada tanggal 4 November, sekelompok tentara datang ke rumah Siauw dan setelah menggeledah rumahnya, mereka menangkap Siauw.³⁹ Siauw Giok Tjhan ditangkap dan ditahan tanpa pernah diadili. Siauw meringkuk dalam tahanan selama 12 tahun.⁴⁰ Tanggal 12 Maret Mayjend Suharto mengeluarkan instruksi untuk membubarkan PKI dan seluruh ormasnya termasuk BAPERKI.

D. Penutup Simpulan

BAPERKI merupakan organisasi massa orang Cina yang paling berhasil di Indonesia. Beberapa bulan setelah terbentuk BAPERKI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di Indonesia. Keberhasilan BAPERKI ada di berbagai bidang. BAPERKI yang ikut dalam Pemilu 1955 berhasil menduduki peringkat 17 dari 48 peserta pemilu. Hasil itu membuat Siauw Giok Tjhan dapat duduk di DPR. Siauw yang dekat dengan beberapa menteri berhasil menentang berbagai peraturan yang merugikan orang Cina dan mengandung diskriminasi rasial.

BAPERKI lebih disukai orang Cina saat itu karena aktif membantu memudahkan orang Cina untuk menjadi Warga Negara Indonesia. BAPERKI juga aktif dalam bidang pendidikan dengan mendirikan berbagai sekolah sampai dengan Universitas.

Keputusan menjadi Pro Sukarno membawa BAPERKI satu kubu dengan PKI. Hubungan timbale balik pun terjadi antara BAPERKI dan PKI. Meletusnya Gerakan 30 September membawa dampak besar bagi BAPERKI. Anggota BAPERKI dan mahasiswa Universitas BAPERKI ada yang terbukti terlibat dalam Gerakan 30 September. Sebagian anggota BAPERKI menjadi anggota PKI, dan sebagian mahasiswa Universitas BAPERKI menjadi anggota Pemuda Rakyat milik PKI.

BAPERKI kemudian dibubarkan dan anggotanya ada yang ditahan tanpa diadili.

Siauw Giok Tjhan ditahan tanpa diadili selama 12 tahun.

Saran

BAPERKI merupakan organisasi yang pernah berpengaruh, khususnya dalam kajian sejarah orang Cina di Indonesia. Pembahasan mengenai BAPERKI jarang ditemui dalam buku-buku sejarah Indonesia. Nama Siauw Giok Tjhan juga jarang ditemui dalam buku-buku sejarah Indonesia. Seharusnya dalam sejarah Indonesia tahun 1954 sampai dengan 1965 keberadaan BAPERKI ditulis untuk memberi wawasan tentang organisasi massa Cina yang pernah berhasil di zamannya.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Arsip Nasional Indonesia, Hubungan Rakyat nomor 730. Surat Lembaga Kesatuan Bangsa Pusat tahun 1963, hal BAPERKI

Arsip Nasional Indonesia, Kabinet Presiden no 1427. Panitia Peringatan Hari Pahlawan 10 November 1957 Kotapraja Salatiga.

Arsip Nasional, Pidato Presiden nomor 469, Amanat PJM Presiden Sukarno Pada Pembukaan Kongres Nasional Ke-VIII BAPERKI di Gedung Olahraga Gelora Bung Karno, Djakarta, 14 Maret 1963

Sumber Koran

Koran Pantjajawarta, 2 April 1960

Koran Sin Po, 30 Januari 1954

Koran Sin Po, 20 Februari 1954

Koran Sin Po, 10 Agustus 1954

Koran Sin Po, 24 Juli 1960

Koran Sin Po, 28 Desember 1960

Sumber buku

Alimuddin Tuwu(ed).1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.

Benny G Setiono. 2008. *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Transmedia Pustaka.

³⁹ Siauw Tiong Djin. *op.cit.*, halaman

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 396

Hendro Subroto. 2008. *Dewan Revolusi PKI Menguak Kegagalannya Mengkomunikasikan Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Leo Suryadinata. 1986. *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta : PT Graviti Pers

_____. 1999. *Etnis Tionghoa Dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

_____. 2002. *Negara Dan Etnis Tionghoa; kasus Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Onghokham. 2008. *Anti Cina, Kapitalisme Cina Dan Gerakan Cina; sejarah etnis Cina di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1994. *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*. Jakarta : PT. Ghalia Indonesia.

Siauw Tiong Djin. 1999. *Siauw Giok Tjhan Perjuangan Seorang Patriot Membangun Nasion Indonesia dan Masyarakat Bhineka Tunggal Ika*. Jakarta : Hasta Mitra

Sudargo Gautama. 1987. *Warga Negara dan Orang Asing;berikut peraturan dan contoh-contoh*. Bandung: Alumni

